

## BAB V

### TEMUAN DAN ANALISIS DATA

Implementasi Kebijakan adalah salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan merupakan tahapan yang penting dalam kebijakan publik. Dalam proses implementasi kebijakan akan menentukan apakah kebijakan yang telah dibuat telah sampai pada target sasaran ataupun kebijakan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan proses implementasi Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Retah Kabupaten Indragiri Hilir. Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air adalah Program yang bertujuan untuk memperbaiki lahan perkebunan kelapa rakyat yang rusak dan lingkungan sekitar, hal ini dikarenakan berbagai masalah salah satunya adalah air laut yang semakin tinggi yang masuk dan menggenangi lahan perkebunan kelapa rakyat. Program Pembangunan, Peningkata dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air Perkebunan ini menjadi fokus pembangunan di bidang perkebunan 5 tahun ke depan, dari tahun 2014-2019. Program ini juga dilanjutkan setelah Bupati HM. Wardan terpilih kembali untuk periode kedua.

Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air dilakukan dalam empat tahap yaitu: Tahap Persiapan, Tahap Perencanaan Partisipatif, Tahap Pelaksanaan Fisik serta Tahap Pasca Pelaksanaan Fisik. Program ini terdiri dari pembangunan tanggul mekanik dan manual, saluran air atau saluran produksi,

serta pintu klep ang digunakan untuk mengatur masuk dan keluar air dari lahan perkebunan.

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan Donald van Meter dan Carl Van Horn. Dalam teori ini terdapat enam variabel utama yang digunakan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, disposisi implementor. Keenam variabel ini akan dijabarkan dan dijelaskan pada sub bab sebagai berikut

## **1.1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

### **1.1.1. Jelas dan Terukur**

Sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan sesuai dengan isi dan tujuan dari kebijakan yang ada. Dengan begitu implementasi kebijakan akan dilakukan sesuai dengan tegas dan jelas sehingga tidak terjadi multi-interpretasi baik dari implementor maupun dari kelompok sasaran.

Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air terdiri dari Tanggul, Saluran(parit), dan pintu klep. Tujuan dari Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2014 lampiran Bab 1 yaitu untuk menyelamatkan lahan perkebunan kelapa rakyat serta lingkungan yang ada disekitarnya yang telah terendam pasang air laut, sehingga lahan

perkebunan tersebut dapat digunakan dan menghasilkan kembali serta meningkatkan kesejahteraan para petani.

Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air dilakukan dalam Empat Tahap yaitu Tahap Persiapan, Tahap Perencanaan Partisipatif, Tahap Pelaksanaan Fisik dan Tahap Pasca Pelaksanaan Fisik. Tahap-tahap tersebut tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2014 pada pasal 2 ayat 1. Adanya tahap-tahap yang jelas dalam Pelaksanaan program tentu akan memudahkan dalam melaksanakannya. Dengan demikian Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air akan terlaksana dengan lebih baik dan sistematis.

Agar implementasi Program Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air dapat berjalan baik sesuai dengan kebijakan yang ada maka harus terdapat kejelasan tujuan dan ukuran keberhasilan program. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir :

“...Jadi tujuan adanya program ini adalah untuk menyelamatkan kebun kelapa rakyat tadi , sehingga dapat mengembalikan produktivitas lahan kembali, meingkatkan mutu produksi lahan, sehingga masyarakat dapat menikmati hasilnya dan masyarakat dapat hidup lebih baik dan sejahtera... tetapi semenjak tahun 2017 Bupati ingin melakukan percepatan pembangunan Trio Tata Air, jadi semua pelaksanaan Trio Tata Air dilaksanakan di Kecamatan semua karena Kecamatan lebih dekat dengan masyarakat sehingga bupati langsung instruksi ke camat dan kami monev aja dan meminta laporan” (wawancara peneliti dengan Kepala Dinas

Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Drs. H. Eddiwan Sasbi, MM pada 23 Oktober 2019)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa tujuan dari Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air adalah untuk menyelamatkan lahan perkebunan yang rusak agar dapat digunakan kembali, meningkatkan produktivitas lahan, meningkatkan mutu produksi sehingga masyarakat petani bisa hidup lebih sejahtera. Dan pada tahun 2017 pelaksanaan program dilaksanakan sepenuhnya oleh Kecamatan hal ini dikarenakan Bupati Indragiri Hilir ingin melakukan percepatan pembangunan Trio Tata Air karena Pemerintah Kecamatan lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih mengetahui kondisi dilapangan. Setelah pelaksanaan program dilaksanakan oleh Kecamatan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir hanya melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan. Berikut wawancara peneliti dengan Camat Reteh Kabupaten Indragiri Hilir selaku Penanggung Jawab Eskavator di Kecamatan Reteh :

“... ya tujuannya untuk menyelamatkan perkebunan kelapa yang rusak milik masyarakat dan juga lingkungan sekitar ... kita melaksanakannya sesuai anggaran pertahunnya saja jika sudah tercapai yang seselai... iya semenjak 2017 semua pelaksanaan Trio Tata Air ada di Kecamatan anggaran pun langsung dari DPA Kecamatan“ (wawancara peneliti dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Reteh Mohd. Rafi, S.Pd pada 30 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa tujuan utama dari Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio

Tata Air adalah untuk menyelamatkan lahan perkebunan yang rusak sehingga dapat digunakan kembali dan juga dapat menyelamatkan lingkungan sekitar perkebunan tersebut. Dari tahun 2017 pelaksanaan Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air dilakukan langsung oleh Pemerintah Kecamatan yang dianggarkan langsung dari DPA Kecamatan.

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sungai Asam :

“... iya dek Trio Tata Air itu tujuannya memang untuk kebun-kebun kelapa yang rusak punya masyarakat, kasihan petani-petani yang kebun nya rusak tidak tau juga kadang mereka mau kerjakan apa ... kalau tidak salah sejak 2017 di Kecamatan semua pelaksanaan Trio Tata Air... kemaren tahun 2018 kami dapat 4 km dan sudah selesai dilakukan 4 km”(wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sungai Asam M. Taher pada 31 oktober 2019).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa tujuan dari program ini adalah untuk memperbaiki perkebunan kelapa petani-petani yang lahan kebunnya telah rusak sehingga petani-petani tersebut kembali memiliki pekerjaan untuk dilakukan. Pada tahun 2018 Desa Sungai Undan telah mendapatkan pembangunan 4 km Trio Tata Air dan telah terealisasi 4 km.

Berikut wawancara penelit dengan Kepala Desa Sungai Undan :

“... tujuannya itu menyelamatkan kebun-kebun kelapa petani yang rusak ini, kasihan ada yang tak bisa berbuah lagi, ada yang tak bedaun lagi kelapanya, malah ada yang sampai jadi tanah lumpur aja semua...” (wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sungai Undan Abdul Rakhman, S.Pd pada 31 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat terlihat bahwa tujuan dari program ini adalah untuk menyelamatkan kebun kelapa yang rusak, sampai

ada lahan yang benar-benar rusak parah dan harus segera dilakukan tindakan cepat. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa Tanjung Labuh :

“... perkebunan banyak yang rusak, semua punya masyarakat, jadi kalau sudah diselamatkan kebun-kebun kelapa punya petani inilah... dampaknya pun bisa memperbaiki lingkungan sekitar yang juga tenggelam ... tahun kemaren 2018 ada bangun lagi 3 km dan sudah selesai semua” ( wawancara peneliti dengan Kepala Desa Tanjung Labuh Hasbullah pada 1 Nobember 2019 )

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa tujuan adanya program ini adalah untuk menyelamatkan lingkungan dan juga perkebunan kelapa rakyat sehingga dapat digunakan kembali. Pada tahun 2018 Desa Tanjung Labuh mendapat jatah Trio Tata Air sebanyak 3 km dan telah diselesaikan 3 km yang meliputi tanggul, saluran air atau produksi serta pintu klep.

Pelaksanaan Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air yang dilakukan di Desa-Desa Kecamatan Reteh telah dirasakan oleh masyarakat petani sekitar yang kebunnya juga terkena pembangunan tanggul, dengan demikian para petani dapat bersiap-siap untuk kembali bertani dilahan perkebuna mereka. Berikut wawancara dengan salah satu masyarakat petani di Desa Sungai Asam :

“... iyaa dek kemaren di Sungai Asam ni dapat pembangunan tanggul 4 kilo, sudah selesai semua sudah, kalau sudah tidak belumpur lagi nanti kami mau bertanam kelapa lagi.. “(wawancara peneliti dengan Bapak Johan salah satu masyarakat di Desa Sungai Asam 2 November 2019)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa masyarakat ikut merasakan dan membenarkan adanya pembangunan tanggul 4 km di Desa

Sungai Asam dan berencana untuk bercocok tanam lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air terlaksana dengan baik.

Tabel 5.1

Data Pembangunan Trio Tata Air di Kecamatan Reteh Tahun 2017-2019

No	Tahun dan Lokasi	Pagu Dana (Rp)	Target (KM)	Realisasi (KM)	Tidak Selesai (KM)
<b>2017</b>					
1	Parit Reteh Lama 2 Desa Sanglar	120.000.000	6	0	6
2	Parit Selamat, Parti 1 dan Parit 2 Desa Tanjung Labuh	200.000.000	10	6	4
3	Reteh Lama 1 Desa Sungai Kecil	120.000.000	6	0	6
4	Parit Cinta Desa Sanglar	50.000.000	2,5	0	2,5
		<b>490.000.000</b>	<b>24,5</b>	<b>6</b>	<b>18,5</b>
<b>2018</b>					
1	Desa Sungai Asam Kecamatan Reteh	129.000.000	6	4	2
2	Parit Sungai Terusan Desa Mekar Sari	90.000.000	4,19	0	4,19
3	Parit Muda Desa Sungai Terab	150.000.000	6,98	6,5	0,48
4	Desa Sungai Asam	86.000.000	4	0	4
5	Parit Sekak, Tengah, Lapis, Nasib, Pengulu Desa Tanjung Labuh	215.000.000	10	6	4
6	Suak Labuh Desa Tanjung Labuh	64.500.000	3	3	0
		<b>734.000.000</b>	<b>34,2</b>	<b>19,5</b>	<b>14,7</b>
<b>2019</b>					

1	Desa Pulau Kecil	107.000.000	5	N/A	N/A
2	Kelurahan Madani	107.000.000	5	N/A	N/A
3	Desa Pulau Ruku	107.000.000	5	N/A	N/A
4	Desa Seberang Pulau Kijang	100.000.000	4,65	N/A	N/A
		<b>422.500.000</b>	<b>19,65</b>	N/A	N/A

Sumber: Olahan Peneliti tahun 2019

Berdasarkan Tabel 5.1 diatas dapat dilihat data pembangunan Trio Tata Air di Kecamatan Reteh 3 tahun terakhir mulai dari tahun 2017 sampai 2019 dimana target dan realisasi tidak semua tercapai pada tahun 2017 target pembangunan mencapai 24,5 km hanya terealisasi 6 km saja dan tahun 2018 dari target 34,2 km dan terealisasi 19,5 km. Sedangkan pada tahun 2019 target Program Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air adalah 19,65 tetapi data realisasi program belum ada. Tidak tercapainya target ini seharusnya tentu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah untuk dapat melaksanakan lebih baik lagi ke depannya sehingga dapat mencapai target yang ditentukan. Berikut pernyataan kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait target yang tidak tercapai.

“... kita banyak kendala dilapangan soalnya beberapa tahun ini air laut tinggi eskavator tidak bisa lewat darat harus lewat laut, kalau lewat laut harus sewa tongkang yang anggaran tidak ada untuk itu ...” (wawancara Peneliti dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Reteh Sitti Sulastri Kusumawati, S.Pd 30 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan dilapangan mengalami kendala yaitu air laut yang tinggi yang membuat eskavator tidak bisa lewat menuju lokasi pembangunan sehingga terjadi

keterlambatan dan target tidak tercapai. Hal tersebut juga diketahui oleh salah masyarakat di Desa Tanjung Labuh

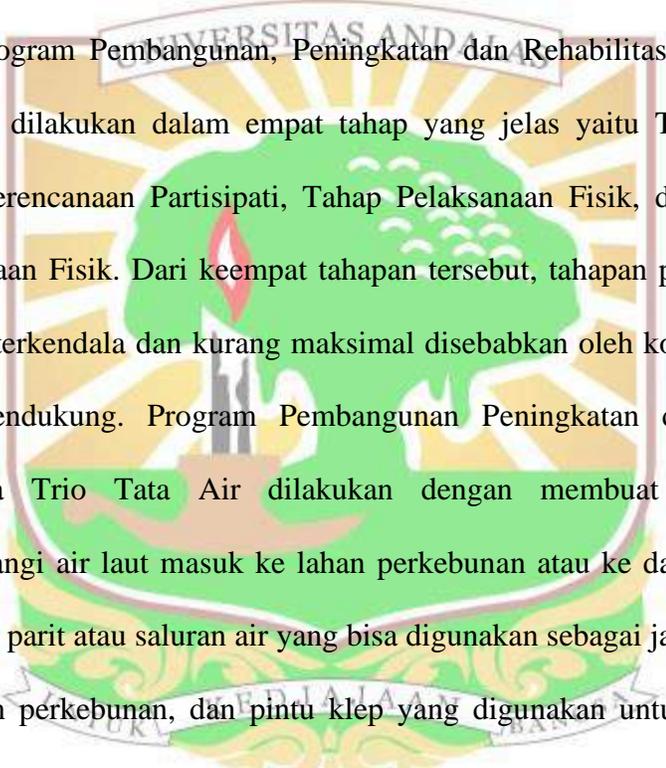
“... betul sekali, air laut tinggi betul susah mau jalan eskavator ke lokasi kebun yang tenggelam, jadi menunggu air surut terlebih dahulu setelah itu mulai dikerjakan lagi baru dikerjakan, terkadang pengerjaan sampai malam kerja...” (wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat di Desa Tanjung Labuh 31 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa tidak sampainya target disebabkan oleh kondisi alam yaitu pasang tinggi air laut yang menyebabkan sulitnya tim untuk mencapai lokasi sehingga harus menunggu air surut. Hal ini juga menyebabkan operator bekerja sampai malam walau target belum tercapai.

Pelaksanaan Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air dilakukan dalam empat tahap. Dalam pelaksanaannya empat tahap tersebut harus dilakukan dengan baik agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. dilihat dari kondisi target dan realisasi pelaksanaan program banyak yang tidak tercapai disebabkan dari berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut terdapat pada tahap ke tiga yaitu tahap pelaksanaan fisik, dimana pada tahap tersebut pelaksanaan fisik terkendala akibat dari kondisi alam yang tidak mendukung sehingga tahap tersebut kurang maksimal.

Menurut Donald Van Meter dan Van Horn, standar dan tujuan kebijakan harus jelas dan terukur. Apabila standar dan tujuan kebijakan tidak jelas maka akan mengakibatkan multi-interpretasi. Penjabaran-penjabaran

diatas jika dilihat dengan indikator jelas dan terukur yang dikemukakan Donald Van Meter dan Van Horn dapat disimpulkan bahwa Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air sudah memiliki dan tujuan yang jelas yaitu untuk menyelamatkan lahan perkebunan yang rusak dan lingkungan sekitar sehingga dapat meningkatkan produktivitas lahan perkebunan serta masyarakat lebih sejahtera.



Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air dilakukan dalam empat tahap yang jelas yaitu Tahap Persiapan, Tahap Perencanaan Partisipati, Tahap Pelaksanaan Fisik, dan Tahap Pasca Pelaksanaan Fisik. Dari keempat tahapan tersebut, tahapan pelaksanaan fisik menjadi terkendala dan kurang maksimal disebabkan oleh kondisi alam yang tidak mendukung. Program Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air dilakukan dengan membuat tanggul untuk menghalangi air laut masuk ke lahan perkebunan atau ke daratan, kemudian membuat parit atau saluran air yang bisa digunakan sebagai jalur produksi dan pengairan perkebunan, dan pintu klep yang digunakan untuk membatasi air yang masuk dan keluar lahan perkebunan.

### **5.1.2 Keadilan**

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam ukuran dan tujuan kebijakan ada faktor keadilan agar kebijakan dapat berjalan dengan baik. Keadilan yang dimaksud adalah kebijakan yang dibuat harus mencakup aspirasi dan keinginan masyarakat sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam

implementasinya. Keadilan disini adalah dimana pada pelaksanaan Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air diberlakukan aturan yang sama bagi semua pihak yang terlibat.

Pada implementasinya ada 3 aturan dalam bentuk Peraturan Bupati yang mengatur Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air sebagai berikut :

- 
1. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air Perkebunan
  2. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penggunaan Eskavator untuk Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air Perkebunan Yang di Kelola Oleh Pemerintah Kecamatan
  3. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Eskavator Untuk Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air.

Dalam implementasinya Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di semua instansi yang terkait menggunakan aturan yang sama. Berikut wawancara dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri hilir.

“ ... aturan kita masih yang lama belum ganti, petunjuk teknis yang utama, tetapi pada tahun 2020 akan diresmikan aturan baru yang isi intinya adalah mengembalikan pelaksanaan Trio Tata Air langsung dari Dinas sama seperti semula... “(wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Drs. H. Eddiwan Sasbi, MM pada 23 oktober 2019)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa program Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air sampai saat ini masih menggunakan aturan yang sama, akan tetapi pada tahun 2020 pemerintah berencana akan mengeluarkan aturan yang baru yang isinya terkait pengembalian pelaksanaan program dilakukan kembali oleh Dinas perkebunan. Hal serupa juga sesuai dengan pernyataan dari Camat Reteh Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

“ ... aturan kita masih menggunakan yang lama, sampai sekarang belum berubah, tapi tahun 2020 nanti rencana bupati mau keluaran aturan baru terkait Trio Tata Air, yang isinya nanti mengembalikan pelaksanaan Trio Tata Air ke Dinas Perkebunan Kabupaten lagi ...“ (wawancara peneliti dengan Camat Reteh Mohd. Rafi, S.Pd pada 30 oktober 2019)

Berdasarkan aturan diatas, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kecamatan Reteh juga masih menggunakan aturan yang lama. Camat Reteh juga mengkonfirmasi bahwa akan ada aturan baru tahun 2020 yang akan mengembalikan pelaksanaan Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air kembali ke Dinas Perkebunan Indragiri Hilir.

Melihat dari kondisi kerusakan perkebunan yang berbeda Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini Dinas Perkebunan melakukan

pembangunan sesuai dengan kemampuan alat berat dan kondisi kerusakan yang ada sehingga tidak ada daerah tertentu mendapatkan pembangunan Trio Tata Air yang berlebih. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

“... kemampuan alat berat kan terbatas, waktu juga terbatas, 1 eskavator itu hanya dapat melakukan pembangunan maksimal 20-25 km pertahun, 1 km itu bisa menyelamatkan 25 hektar lahan, jika dipaksakan bisa rusak, mau membelinya lagi anggaran juga tidak ada, jadi pembangunan Trio Tata Air kita sesuaikan dengan kondisi kerusakan dan kemampuan alat berat, dan juga harus kita perhitungkan baik-baik...” (wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Drs. H. Eddiwan Sasbi, MM pada 23 Oktober 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir berusaha sedetail mungkin dalam membangun Trio Tata Air di masing-masing lahan perkebunan rusak masyarakat. Pembangunan Trio Tata Air dilakukan sesuai dengan kondisi kerusakan lahan dan kemampuan alat, karena 1 eskavator hanya bisa membangun 20 sampai 25 km Trio Tata Air pertahun, dimana 1 km Trio Tata Air diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 25 hektar lahan perkebunan masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya harus diperhitungkan baik-baik dan menjaga kondisi alat berat. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Camat Reteh Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

“... kita harus adil, karna luas kerusakannya beda-beda, alat berat juga tidak bisa dipaksakan sehingga kita harus hati-hati agar alat berat tidak rusak dan masyarakat mengerti...” (wawancara peneliti

dengan Camat Reteh Bapak Mohd. Rafi, S.Pd pada 30 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kecamatan Reteh berusaha adil dalam melaksanakan Program Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air. Hal ini disebabkan oleh kerusakan lahan perkebunan yang berbeda-beda dan juga keterbatasan kemampuan alat berat. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa mengerti dan menjaga kondisi alat berat agar tidak cepat rusak. Berikut hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Sungai Asam:

“... kalau dibilang cukup tentu tidak, tapi kalau adil pemerintah memang berusaha adil, kita dapat empat kilometer, Desa sebelah ada yang dapat lebih ada yang dapat kurang dari kami, pemerinhah melihat kondisi keruskan dulu...kan kita diikutsertakan saat sosialisasi dan musyawarah dulu” (wawancara peneliti dengan Johan masyarakat Desa Sungai Asam M. Taher pada 31 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa masyarakat telah mengerti dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah dan merasa pemerintah tekah adil dalam melaksanakan Program Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitas Prasarana Trio Tata Air sehingga masyarakat memngerti, hanya saja masyarakat merasa pembangunannya masih kurang karena keterbatasan alat berat dan anggaran. Masyarakat diikutseratakan dalam musyawarah yang dilakukan pada Tahap Persiapan dan Tahap Perencanaan Partisipatif sehingga masyarakat dapat lebuh mengerti.

Indikator keadilan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn diamna kebijakan harus mencakup semua keinginan dan aspirasi masyarakat

serta memberlakukan aturan yang sama bagi seluruh pihak. Jika dilihat dari penjabaran diatas seluruh pihak-pihak yang terlibat telah menggunakan aturan yang sama dalam meaksanakan Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air yaitu Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air Perkebunan, Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penggunaan Eskavator untuk Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air Perkebunan Yang di Kelola Oleh Pemerintah Kecamatan, Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Eskavator Untuk Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air Perkebuna yang Dikelola Oleh Pemerintah Kecamatan Secara Swakelola dan Swadaya.

Selain itu Bupati akan mengeluarkan peraturan baru pada tahun 2020 yang dimana isinya pelaksanaan program dilaksanakan kembali oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dan Pemerintah Kecamatan Reteh juga berusaha adil dalam melaksanakan Program Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan alat berat dalam beoperasi dan juga perbedaan kondisi kerusakan yang ada pada perkebunan. Sehingga luas pembangunan Trio Tata Air harus sesuai dengan kondisi kerusakan lahan dan kemampuan alat berat eskavator.

## 1.2. Sumber Daya

Dukungan sumber daya sangat diperlukan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan agar dapat terlaksana dengan baik. Kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia akan sangat mempengaruhi keberhasilan proses implementasi sebuah kebijakan. Sumber Daya adalah hal yang sangat Penting dalam Implementasi Program Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air. Penentuan kebutuhan sumber daya terdapat pada Tahap Persiapan dan Tahap Perencanaan Partisipatif, kemudian sumber daya tersebut digunakan dalam Tahap Pelaksanaan Fisik. Jika sumber daya kurang atau tidak memadai dalam mendukung pelaksanaan Program tentu program akan terkendala dalam pelaksanaan dan kurang maksimal. Maka dari itu sumber daya sangat diperlukan pada setiap tahapan implementasi Program Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam implementasi diperlukan sumber daya sebagai berikut:

### 1.2.1. Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu proses implementasi Sumber daya manusia yang berkualitas sangat dituntut adanya dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam kebijakan.

Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air pada awalnya dilaksanakan seluruhnya oleh Dinas Perkebunan, tetapi kemudian pada tahun 2017 pekerjaan dilapangan semuanya dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan melalui lembaga pengelola eskavator yang dibentuk oleh camat sebagai penanggung jawab. Berikut wawancara dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten :

“... benar, dulu awalnya kita Dinas yang melakukan pembangunan Trio Tata Air berkolaborasi dengan camat dan Desa, setelah 2017 bupati ingin melakukan percepatan sehingga pelaksanaan dilakukan langsung oleh Kecamatan kita di Dinas melakukan monev...” (wawancara dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir pada 23 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air pada awalnya dilaksanakan seluruhnya oleh Dinas Perkebunan bekerja sama dengan Kecamatan dan Desa. Kemudian sejak tahun 2017 Bupati ingin melakukan percepatan sehingga bupati menginstruksikan pengerjaan langsung dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan sedangkan di Dinas Perkebunan melakukan monitoring dan evaluasi kepada Kecamatan. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan dari Camat Reteh Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

“... sekarang semua dilaksanakan di Kecamatan, dulu Kabupaten sejak 2017 semua di Kecamatan, jadi kita lapor ke Dinas dan Dinas melakukan monev. Kita di Kecamatan bertanggung jawab langsung kepada bupati dan memberikan laporan kepada Dinas ...” (wawancara peneliti dengan Camat Reteh Mohd. Rafi, S.Pd pada 30 oktober 2019)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program Trio Tata Air sejak tahun dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Dan Dinas Perkebunan melakukan Moitoring dan Evaluasi. Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab langsung ke bupati dan memberikan laporan ke Dinas Perkebunan.

Pelaksanaan Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh dilaksanakan oleh 9 orang yang tergabung dalam lembaga pengelola eskavator yang diatur dalam surat Keputusan Camat Reteh sebagai berikut :

Tabel 5.2  
Struktur Elmbaga Pengelola Eskavator Kecamatan Reteh

No	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	H. Ahmad Khusairi, S.sos, MM/Camat	Penanggung Jawab
2	Sitti Sulastri Kusumawati, S.Sos/Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Ketua
3	Sugityanto/ Sataf Kantor Camat	Sekretaris
4	Sugiono, S.Pkp/ Kepala UPT Disbun	Anggota
5	Hasbulla/ Staf Kantor Camat	Anggota
6	Rossia Warman	Operator
7	Sukarni	Helper
8	Parnianto	Pengaman
9	M. Softyan	Pengawas

Sumber: Surat Keputusan Camat Reteh Tahun 2015 Tentang Lembaga Pengelola Eskavator

Berdasarkan Tabel 5.2 diatas dapat dilihat adanya anggota-anggota Lembaga pengelola eskavator di Kecamatan Reteh yang terdiri dari 9 orang termasuk penanggung jawab dan ketua pengelola. Anggota pengelola

eskavator tersebut melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Berikut hasil wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Reteh :

“... jumlah personil kita cukup, karna kan yang berkerja mesin, bukan tenaga manusia, masyarakat juga membantu dilapangan dan membuat kerja kita lebih terbantu ... camat penanggung jawab kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa saya ketua, dan yang dilapangan mengerjakan juga sudah ada operatornya disana juga ada petugas yang menjaga, masyarakat juga ikut menjaga eskavator ya sudah cukuplah...” ( wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Reteh Sitti Sulastri Kusumawati, S.Sos pada 30 oktober 2019)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa pemerintah Kecamatan merasa personil sudah cukup, karena pembangunan yang menggunakan eskavator. Kemudian juga masyarakat yang ikut gotong royong juga sangat membantu pelaksanaan dilapangan. Camat sebagai penanggung jawab, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai ketua, dan dilapangan sudah ada operator yang menggerakan Eskavator juga petugas keamanan. Berikut wawancara dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

“... di Dinas ini kita personil sudah cukuplah dalam pelaksanaan program Trio Tata Air, jika kita ke lapangan kita utus 2 atau 3 orang saja kemudian Koordinasi dengan camat setempat, mereka yang diutus juga sesuai dengan bidangnya ya orang yg paham teknis lah dari bidang sarana-prasarana...”( wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Drs. H. Eddiwan Sasbi, MM pada 23 oktober 2019 )

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa personil yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan

program Trio Tata Air telah cukup. Dinas Perkebunan biasanya mengutus 2 atau 3 orang ke lokasi pelaksanaan yang kemudian berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan. Latar belakang mereka juga sesuai dengan bidang masing-masing sehingga dapat diasumsikan personil telah ahli dalam bidangnya.

Anggota lembaga pengelola eskavator dalam melaksanakan tugasnya telah memiliki tugasnya masing-masing. Berikut wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Reteh :

“... sudah sesuai dibidangnya, camat sebagai penanggung jawab sesuai dengan arahan perbub, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai ketua juga sesuai perbub, kemudian anggota lain membantu karena tidak mungkin Cuma ada ketua saja, dan eskavator ada operatornya yang hanya dia yang bisa menggerakkan eskavator, ada helper bantu operator untuk mengisi bahan bakar eskavator, ada pengaman yang jaga eskavator, ya sudah sesuai lah ...” (wawancara peneliti dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Reteh Sitti Sulastris Kusumawati, S.Sos pada 30 Oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa anggota pengelola eskavator telah memiliki tugasnya masing-masing dan telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditugaskan. Dalam pelaksanaan program Trio Tata Air tidak terdapat kendala-kendala tertentu terkait sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kualitas. Anggota pengelola eskavator melaksanakan program langsung dihadapan masyarakat sehingga dengan mudah mengetahui berbagai persoalan yang berkaitan dengan Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitas Prasarana Trio Tata Air

di Kecamatan Reteh. Berikut wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Sungai Asam :

“... kalau diliat dari semua anggota pemerintah yang datang orang-orang tu lebih pandai lah dari kita apalagi operatornya itu sudah berpengalaman sudah sering nampaknya dapat tugas jadi operator, kalau ada kendala di kebun paling kita masyarakat sama-sama bantu, karna kan untuk masyarakat juga...”(wawancara peneliti dengan Johan salah satu masyarakat Sungai Asam)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa pelaksana pembangunan Trio Tata Air dan operator yang bertugas menggerakkan eskavator dianggap telah berpengalaman dan pandai menggunakan eskavator oleh masyarakat. Dan jika terjadi kendala di lapangan masyarakat akan bersama-sama membantu karena program Trio Tata Air dilakukan untuk memperbaiki kebun masyarakat.



Gambar 5.1  
Gotong-royong Pemerintah dan Masyarakat



Sumber : Dokumentasi Peneliti Tahun 2019

Gambar 5.1 menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Trio Tata Air dilakukan secara gotong royong. Dapat dilihat gambar eskavator dan masyarakat yang bersama-sama menebang semak belukar dan membuat jalan agar eskavator

dapat diarahkan ke lokasi pembangunan. Dengan adanya gotong royong masyarakat ini akan membuat pelaksanaan dilapangan berjalan lebih baik dan jika ada kekurangan personil akan tertutupi dengan adanya bantuan masyarakat. Personil atau aktor yang terlibat dalam Implementasi Program Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air dapat dilihat pada Tabel 5.3 sebagai Berikut :


 Tabel 5.3  
 Aktor Yang Terlibat Pada Setiap Tahap Implementasi Program Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tahap Pelaksanaan	Aktor yang terlibat
1.	Tahap Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dins Perkebunan (3 orang)</li> <li>- Tim Pengelola Eskavator Kecamatan Reteh (9 orang)</li> <li>- Kepala Desa Setempat (1 orang)</li> <li>- Masyarakat</li> </ul>
2.	Tahap Perencanaan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dins Perkebunan (3 orang)</li> <li>- Tim Pengelola Eskavator Kecamatan Reteh (9 orang)</li> <li>- Kepala Desa Setempat (1 orang)</li> <li>- Masyarakat</li> </ul>
3.	Tahap Pelaksanaan Fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Pengelola Eskavator Kecamatan Reteh (9 orang)</li> <li>- Masyarakat</li> </ul>
4.	Tahap Pasca Pelaksanaan Fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perkebunan</li> <li>- Tim Pengelola Eskavator (9 orang)</li> <li>- Masyarakat</li> </ul>

*Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2019*

Dari Tabel 5.3 di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat selalau terlibat pada setiap tahap proses implementasi Program Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahap persiapan dan tahap perencanaan partisipatif semua aktor terlibat, dimana Dinas Perkebunan, Kecamatan Reteh dalam hal ini Tim Pengelola Eskavator, Kepala Desa Setemat dan juga masyarakat terlibat. Kemudian pada tahap pelaksanaan fisik yang terlibat adalah Tim Pengelola Eskavator yang juga dibantu oleh masyarakat dalam pelaksanaannya. Pada tahap terakhir yaitu tahap pasca pelaksanaan fisik Tim Pengelola Eskavator bersama masyarakat bermusyawarah dan membuat laporan kemudian menyerahkan laporan tersebut kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi. Sumber daya manusia dapat berupa kuantitas atau jumlah personil dan kualitas atau kompetensi personil untuk implementasi sebuah kebijakan. Kebutuhan Sumber daya manusia dalam Implementasi Program Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air ditentukan pada tahap Persiapan dan Perencanaan Partisipatif. Berbagai pembahasan diatas memperlihatkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Reteh dalam hal ini lembaga pengelola eskavator dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala kekuarangan sumber daya

manusia. Secara kualitas dan kemampuan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Lembaga Pengelola Eskavator Kecamatan Reteh terdiri dari orang-orang yang sudah sesuai dengan bidangnya seperti operator yang menggerakkan eskavator yang merupakan orang yang benar-benar pandai menggunakan eskavator.

### 1.2.2. Sumber Daya Non-Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang penting, akan tetapi ada sumber daya lain yang tidak kalah penting dari sumber daya manusia, yaitu sumber daya finansial dan sarana prasarana fisik. Jika sumber daya telah mencukupi dan memiliki kualitas yang baik namun sumber daya non-manusia tidak memadai maka akan sangat sulit untuk merealisasikan tujuan sebuah kebijakan. Sumber daya non-manusia meliputi sumber daya finansial dan sumber daya sarana-prasarana untuk pelaksanaan program pembangunan, peningkatan dan rehabilitas prasarana Trio Tata Air di Kecamatan reteh.

Pertama adalah sumber daya finansial yang merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi keberhasilan implmentasi sebuah kebijakan. program pembangunan, peningkatan dan rehabilitas prasarana Trio Tata Air yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hilir pada tahun 2014, dimana *leading* sektor dari program ini adalah Dinas Perkebunan akan tetapi setelah tahun 2017 kegiatan Trio Tata Air dilakukan di Kecamatan termasuk anggaran yang diambil langsung dari DPA Kecamatan. Di Kecamatan Reteh sejak tahun

2017 anggaran yang digunakan untuk keperluan Program Trio Tata Air ini bervariasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5.4  
Rencana Anggaran Program Pembangunan, Peningkatan Rehabilitasi  
Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh

No	Tahun	Pagu Dana	Target
1	2017	490.000.000	24,5 km
2	2018	734.500.000	34,2 km
3	2019	422.500.000	19,65 km

Sumber : dokumentasi peneliti tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh pada tahun 2018 merupakan yang paling tinggi dibandingkan tahun 2017 dan 2019. Pada tahun 2018 penggunaan anggaran mencapai Rp. 734.500.000,- yang diambil langsung dari DPA Kecamatan Reteh, anggaran tersebut tentu bukanlah jumlah yang sedikit dan cukup mengingat banyak kebun yang harus diselamatkan. Berikut wawancara peneliti dengan Camat Reteh Kabupaten Indragiri Hilir :

“... anggaran bisa dibilang kurang jika melihat kondisi yang butuh tindakan yang cepat, tapi kita menghabiskan dana sesuai dengan yang tersedia saja karena segitu lah yang bisa dikerjakan, jika mau kerja tambah tentu anggaran juga harus ditambah ...” (wawancara peneliti dengan Camat Kecamatan Reteh Mohd. Rafi, S.Pd pada 30 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa anggaran pelaksanaan program Trio Tata Air masih kurang hal ini dikarenakan kebutuhan kebun yang harus diselamatkan masih banyak sehingga

memerlukan anggaran yang lebih agar kebun yang diselamatkan pun bisa lebih banyak. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Sungai Asam :

“... karena nunggu pemerintah lama, pas pengerjaan juga tidak semua, jadi kami masyarakat swadaya untuk mempercepat pembangunan ... kemaren kami masyarakat swadaya 1,2 milyar, kita sewa eskavator dari Tungal sana, sama minyak-minyak nya pun kami beli, bisa kami masyarakat seselaikan 15 kilo... yaa kalau tidak begitu mau gmna lagi, kita taulah anggaran pemerintah kurang, eskavator 1, kebun rusak banyak, jadi masyarakat inisiatif saja ... “ (wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sungai Asam M. Taher pada 30 oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan program Trio Tata Air masih terkendala pada sumber daya finansial. Kebutuhan masyarakat yang ingin segera diperbaiki kebun mereka membuat mereka melakukan swadaya agar Trio Tata Air segera diselesaikan. Hal ini tentu disebabkan oleh anggaran yang masih pemerintah yang hanya bisa mengerjakan sesuai kemampuan anggaran saja. Berikut wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat di Desa Sungai Asam :

“... nunggu pemerintah lama, jadi kami kemaren itu swadaya biar cepat siapnya ...” (wawancara peneliti dengan Johan salah satu warga di Desa Sungai Asam pada 31 oktober 2019)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa kekurangan sumber daya finansial menyebabkan pelaksanaan program menjadi lambat sehingga masyarakat melakukan swadaya agar kebun yang rusak segera bisa diperbaiki. Dari pemaparan diatas terkait sumber daya finansial dalam pelaksanaan Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh masih kurang hal ini tentu akan menghambat pelaksanaan

program. Kekurangan anggaran dalam melaksanakan kegiatan ini mengakibatkan target program tidak tercapai dan pelaksanaan tiap tahunnya pun tidak bisa diperluas karena adanya keterbatasan finansial.

Selain sumber daya finansial, sumber daya yang tidak kalah penting lainnya adalah sumber daya sarana prasarana. Sarana utama dari pelaksanaan program ini adalah eskavator yang telah diserahkan ke 16 dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Salah satunya adalah Kecamatan Reteh yang mendapat jatah 1 eskavator untuk melaksanakan Program Trio Tata Air.

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perkebunan Indragiri Hilir:

“... iya benar, Eskavator itu kita 4 dari APBD Kabupaten dan 12 itu kita berhasil mendapatkan bantuan dari Provinsi total kita ada 16 eskavator...” (wawancara dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir pada 23 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, Sarana eskavator di Kabupaten Indragiri Hilir ada 16 eskavator. Eskavator tersebut didapatkan dari APBD Kabupaten dan bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau. 4 eskavator dari APBD, dan 12 bantuan dari Provinsi Riau

“... sarana paling utama itu eskavator, total kita punya 16 eskavator, sudah kita bagikan 1 buah per Kecamatan, walaupun itu masih kurang karna 1 eskavator itu kerjanya terbatas dengan kerusakan yang banyak di tiap Kecamatan jadi penggunaannya bergiliran... kebutuhan besar, eskavator Cuma satu per Kecamatan, kalau dipaksa bekerja lebih eskavatornya bisa rusak, 1 eskavator itu biasanya maksimal 20-25 km per tahun sedangkan yang rusak ratusan bahkan ribuan hektar ... nanti yang begilir ini ada lagi masalahnya ni karna tanggul itu ada umurnya 2 tahun sekali harus ditimbun lagi, udah lewat dua tahun tapi panjang tanggul belum sampai, lalu yang di awal tadi jebol lagi, jadi jangankan nak kerja dua kali, ini namanya kerja tak selesai, sama aja tidak, jadi

eskavator perlu ditambah, minimal 2 lah per Kecamatan” (wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir pada 23 oktober 2019 ).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa eskavator merupakan sarana utama dalam melaksanakan program. Di Kabupaten Indragiri Hilir total terdapat 16 eskavator. Masing-masing Kecamatan diberikan 1 buah eskavator. 1 buah eskavator per Kecamatan tidaklah cukup dalam jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat dimana perkebunan yang rusak sangat luas, maksimal kerja eskavator 20 km sampai 25 km pertahun sehingga pemakaian eskavator harus bergiliran. Kemudian dengan adanya bergiliran ini akan timbul masalah lain yaitu tanggul yang sudah dibangun sebelumnya kemungkinan besar akan jebol kembali karena setiap dua tahun tanggul harus ditimbun lagi. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan pernyataan Camat Reth Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

“... eskavator itu sebenarnya tidak cukup kalau Cuma 1 per Kecamatan karna bakal memakan waktu menyelesaikan Trio Tata Air, belum kendala alam, masyarakat ingin secepatnya kebunnya diperbaiki tapi harus sabar karna harus antri ...” (wawancara peneliti dengan Camat Reth Mohd. Rafi, S.Pd pada 30 oktober 2019)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa jatah eskavator 1 per Kecamatan belum cukup untuk mencukupi kebutuhan, karna pelaksanaan yang bergilir akan memakan waktu lama. Selain itu kendala alam juga akan menghambat pelaksanaan program. Dengan demikian masyarakat harus bersabar menunggu giliran. Berikut wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Sungai Asam:

“... eskavator itu kurang, kalau mau kami tinggal aja di Desa ni satu, karna masih banyak yang rusak.. “ (wawancara peneliti dengan Johan salah satu masyarakat di Desa Sungai Asam pada 31 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa jumlah eskavator yang hanya ada 1 per Kecamatan dianggap kurang oleh masyarakat bahkan masyarakat menginginkan disediakan 1 eskavator per Desa.

Gambar 5.2  
Eskavator yang Digunakan di Kecamatan Reteh



*Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2019*

Gambar 5.2 diatas memperlihatkan eskavator yang hanya 1 buah per Kecamatan sedang bekerja membuat saluran air. Eskavator menjadi kunci dalam mempercepat dan memperluas pelaksanaan program sehingga jumlah eskavator yang hanya 1 dianggap kurang cukup dalam upaya melakukan percepatan dan perluasan.

Secara umum ketersediaan sarana dan prasarana fisik dalam pelaksanaan Program Trio Tata Air masih kurang. Hal ini terkait dengan ketersediaan eskavator yang hanya ada 1 per Kecamatan dengan jumlah kerusakan yang sangat besar sehingga akan memakan waktu lama dalam

menyelesaikannya. Eskavator menjadi sarana yang sangat dibutuhkan dalam melakukan Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air ini dikarenakan keadaan alam yang mengahuskan pengerjaan menggunakan alat berat eskavator sehingga pelaksanaan lebih cepat dan lebih baik.

Selain sumber daya finansial dan sarana prasarana, terdapat sumber daya waktu yang tidak kalah penting dalam menentukan keberhasilan implementasi program. Jika program sudah dilaksanakan dengan sumber daya finansial yang baik dan sumber daya manusia yang memadai namun terbentur masalah waktu yang terlalu ketat dan terbatas sehingga pelaksanaan program menjadi sulit untuk dilaksanakan. Berikut wawancara peneliti dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Reteh :

“... waktu juga kita susah, karna gini, kita anggaran turun bulan 3 akhir atau bulan 4, bulan 4 kita begerak kemudian sampai bulan 8 diatas bulan delapan air pasang sudah naik tinggi jadi susah kita mau lanjutkan, apa lagi bulan 10 sampai 12 air pasang tinggi sekali, anggaran tutup buku kerja pun tidak selesai, jadi kira-kira kita Cuma punya waktu sekitar 5 bulan lebih lah dalam setahun, mana cukup rusaknya aja sebanyak itu...”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa sumber daya waktu masih sangat kurang dengan hanya mendapatkan waktu pengerjaan maksimal 5 bulan lebih dalam satu tahun hal ini disebabkan anggaran yang lambat turun dan air pasang yang tinggi yang rutin terjadi di akhir bulan agustus ketas hingga akhir tahun. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sungai Asam

“... waktu itu tak banyak, bulan sembilan pasang sudah tinggi, mana bisa dikerjakan, karena eskavator tidak bisa lewat bagaimana mau kerja ...” (wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sungai Asam pada 30 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat kendala waktu yang terjadi disebabkan oleh keadaan alam, di mana setelah bulan september kegiatan pembangunan sulit dilakukan bahkan tidak bisa dilakukan, sehingga pengerjaan terbatas sampai bulan september dan pelaksanaan program tidak dapat diselesaikan.



Gambar 5.3  
Tanggul Yang Baru Dibangun di Desa Sungai Asam

*Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2019*

Gambar 5.3 diatas memperlihatkan Tanggul yang baru dibangun dan masih basah. Tanggul memiliki waktu dalam bertahan sehingga harus ditimbun berulang kali. Hal ini disebabkan tanggul yang ada menggunakan tanah lumpur yang mengandung banyak air sehingga akan mudah menyusut ketika terkena air laut dan hujan. Penimbunan kembali menjadi terhambat karena proses pembangunan di tempat lain sedang dilakukan dan memakan waktu yang cukup lama.

Sumber daya non manusia merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan program. Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn jika telah memiliki sumber daya manusia yang memadai tetapi tidak memiliki sumber daya non manusia yang mencukupi misalnya sumber daya finansial hal tersebut tentu akan menghambat dan membuat pelaksanaan program akan sulit terealisasi. Pelaksanaan program Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh menggunakan anggaran yang diambil dari DPA Kecamatan.

Penentuan Sumber Daya Non Manusia dalam hal ini adalah finansial, sarana dan prasarana serta waktu ditentukan pada Tahap Persiapan dan Tahap Perencanaan Partisipatif. Anggaran yang dikeluarkan disesuaikan dengan target pengerjaan. Tetapi target pengerjaan sangat jauh dari luas kerusakan lahan yang ada karena keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran ini membuat masyarakat berinisiatif melakukan swadaya untuk menyelesaikan pengerjaan program sehingga dapat segera selesai. Selain finansial sumber daya sarana yaitu eskavator juga dianggap kurang. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan eskavator dalam bekerja tidak bisa lebih dari 25 km setahun sehingga pelaksanaan pembangunan tidak bisa diperluas. Selain itu masalah sumber daya waktu. Dimana waktu pelaksanaan pembangunan tidak bisa maksimal dalam satu tahun. Hal ini disebabkan oleh anggaran yang turun pada akhir bulan maret dan pengerjaan maksimal hanya sampai bulan

september dikarenakan pada bulan september ke atas air pasang sudah mulai tinggi hingga akhir tahun. Jika dilihat bahwa waktu yang tersedia untuk melaksanakan program hanya sekitar 5 bulan dalam satu tahun. Hal ini tentu tidak cukup mengingat kerusakan lahan yang ada masih sangat luas.

### **1.3. Karakteristik Agen Pelaksana**

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

#### **1.3.1. Struktur Birokrasi**

Implementasi sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi dari organisasi yang mengimplementasikan kebijakan. Birokrasi yang panjang dan berbelit-belit akan membuat pelaksanaan kebijakan menjadi tidak berjalan dengan baik. Salah satu hal penting dalam struktur birokrasi adalah tersedianya standar operasional prosedur (SOP) sebagai acuan bagi implementor dalam melaksanakan kebijakan.

Dalam pelaksanaan Program Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air mengikuti SOP yang telah dijelaskan pada petunjuk teknis yang tertera pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Program Pembangunan,

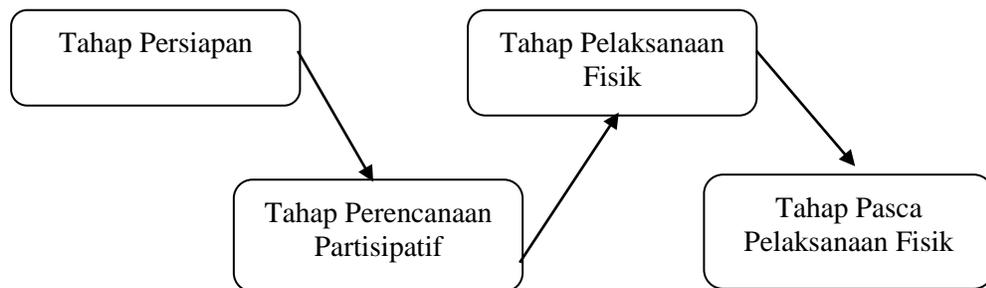
Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air Perkebunan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam wawancara berikut:

“... kalau SOP kita masih pakai petunjuk teknis peraturan bupati yang tahun 2014 tentang Trio Tata Air perkebunan, tidak ada sop lain, kita sosialisasi terlebih dahulu bersama camat dan Kepala Desa setempat setelah itu baru kita mulai bergerak... dari petunjuk teknis kan ada 4 tahap dan sekarang itu pelaksanaan fisik kemudian tahap laporan” (wawancara dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Drs. Eddiwan Sasbi, MM pada 23 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Program Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air menggunakan SOP yang ada pada petunjuk teknis yang tertera pada peraturan bupati tanpa ada SOP khusus dari Dinas Perkebunan. Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2014 bahwa pelaksanaan Program Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air dilakukan dalam empat tahap yaitu tahap persiapan, tahap perencanaan partisipatif, tahap pelaksanaan fisik dan tahap pasca pelaksanaan fisik.

Gambar 5.4

Tahapan Kegiatan Program Pembangunan Peningkatan, dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air



Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan Gambar 5.4 diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air dilakukan dalam empat tahap yaitu: Tahap Persiapan Tahap Perencanaan Partisipatif, Tahap Pelaksanaan Fisik dan Tahap Pasca Pelaksanaan Fisik

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh tidak berbelit-belit. Hal ini karena semenjak tahun 2017 pelaksanaan program dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kecamatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Reteh berikut:

“... SOP kita menggunakan sesuai petunjuk teknis yang lama tahun 2014 karena belum ada aturan baru terkait petunjuk teknis juga, dan tahapan itu sekarang semua tinggal tahap pengerjaan fisik di lapangan dan laporan saja, malah sekarang kan semua di Kecamatan lebih cepat prosesnya ...”(wawancara peneliti dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Reteh Sitti Sulastri Kusumawati S.Sos pada 30 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa SOP yang digunakan masih petunjuk teknis pada Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2014. Dan sekarang tinggal pelaksanaan di lapangan dilaksanakan di tiap Kecamatan. Semenjak tahun 2017 pelaksanaan telah dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kecamatan sehingga proses bisa lebih cepat.

Dalam pelaksanaannya Program Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air didukung oleh struktur organisasi yang jelas dan tidak kompleks sehingga akan mempermudah komunikasi dalam

bekerja. Berikut wawancara peneliti dengan Camat Reteh Kabupaten Indragiri

Hilir :

“... kalau dulu sebelum di Kecamatan, kan ke Dinas dulu kemudian di Kecamatan, dan itu sebentar saja urusannya. nah sekarang semua sudah di Kecamatan hal ini akan mempercepat kinerja di lapangan karena tidak harus berurusan langsung ke Kabupaten lagi, jadi sekarang struktur organisasinya sudah di Kecamatan sesuai Sk pengelola eskavator...” (wawancara peneliti dengan Camat Reteh Mohd. Rafi, S.Pd pada 30 oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan program Trio Tata Air telah memiliki struktur organisasi yang jelas dan tidak kompleks. Struktur organisasi di Kecamatan sesuai surat keputusan Camat tentang lembaga pengelola eskavator sehingga pelaksanaan di lapangan dapat dilakukan dengan cepat. Berikut wawancara peneliti dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Reteh :

“... kita di lapangan pelaksanaanya sesuai tugas yang sudah tertera di SK, tugas masing-masing kita sudah jelas, jadi bisa dilakukan dengan baik sesuai tugas...” (wawancara peneliti dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Reteh Sitti Sulastri Kusumawati, S.Sos pada 30 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Program Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh telah memiliki pembagian tugas yang jelas. Hal ini sesuai dengan surat keputusan Camat terkait lembaga pengelola eskavator. Pada surat keputusan Camat tersebut telah dibagi tugas sesuai dengan yang diperlukan.

Menurut Donald van Meter dan Carl van Horn, pelaksanaan kebijakan akan dipengaruhi oleh struktur birokrasi implementor. Struktur birokrasi yang berbelit-belit dan terlalu panjang akan memakan waktu dan melemahkan pengawasan yang mengakibatkan kebijakan tidak berjalan dengan baik. Dari penjabaran di atas sesuai dengan indikator struktur birokrasi yang dijelaskan oleh Donald Van Meter dan Carl van Horn, Dinas Perkebunan dan Kecamatan Reteh dalam melaksanakan Program Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air tidak memiliki struktur birokrasi yang panjang dan kompleks serta telah memiliki SOP yang jelas sehingga akan memudahkan pelaksanaan program dengan baik. Hal ini juga disebabkan karena sejak tahun 2017 pelaksanaan program dilaksanakan langsung oleh Kecamatan sehingga pelaksanaan dilapangan dapat lebih cepat dilakukan tanpa harus melakukan urusan ke Kabupaten terlebih dahulu.

### 1.3.2. Norma-norma

Norma-norma dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn adalah nilai-nilai yang dibangun serta aturan-aturan yang ada yang telah disepakati. Norma-norma yang diterapkan dan berkembang dalam Dinas Perkebunan dan Pemerintah Kecamatan Reteh akan mempengaruhi lepatuhan dan disiplin dari anggota. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir:

“... gini ya sekarang kan camat semua yang melakukan, tentu camat lebih tau, tapi yang saya tahu sebelum itu pun tidak ada aturan tertentu atau norma tertentu yang sengaja kita buat dan saya rasa sekarang juga demikian, petunjuk teknis dan SK camat terkait pengelola eskavator saya rasa sudah cukup agar lebih menjelaskan tugas masing-masing...” wawancara dengan peneliti dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Drs. Eddiwan Sasbi, MM pada 23 oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa tidak ada aturan atau norma tertentu yang sengaja dibuat untuk menciptakan disiplin pegawai atau anggota dalam melaksanakan program. Pelaksanaan program yang saat ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan menggunakan Surat Keputusan Camat tentang lembaga Pengelola Eskavator digunakan sebagai pedoman agar bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Camat Reteh Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

“...tidak ada norma-norma khusus, biar anggota disiplin mereka kan sudah ada petunjuk teknis dan SK dan mereka bekerja sesuai dengan tugas yang sudah diberikan sesuai SK dan harus serius komitmen pada tugas mereka... yaa kalau mereka melanggar sudah pasti dapat sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku” (wawancara peneliti dengan Camat Reteh Mohd. Rafi, S.Pd pada 30 oktober 2019)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa tidak ada norma-norma khusus yang digunakan dalam melaksanakan program. Dalam pelaksanaan program para anggota mengikuti surat keputusan camat mengenai lembaga pengelola eskavator yang telah diberikan sehingga mereka harus bekerja sesuai dengan tugas masing-masing dan komitmen melakukannya dengan maksimal. Dengan demikian surat keputusan menjadi

instrumen yang membentuk norma dan kebiasaan dalam lembaga pengelola eskavator. Berikut wawancara peneliti dengan kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Reteh :

“... ya kan sudah ada petunjuk teknis sama SK jadi harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang ditugaskan. Alhamdulillah sampai sekarang semua anggota melakukan tugas mereka sesuai dengan tupoksi mereka, ada yang sebagai operator, ada yang sebagai pengamanan, pengawasan, pembantu operator...” (wawancara peneliti dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Reteh Sitti Sulastri Kusumawati, S.Sos pada 30 oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa anggota pengelola eskavator dalam melaksanakan Program sudah sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepada masing-masing anggota. Dengan melakukan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing dan komitmen melakukannya dengan maksimal hal ini menjadikan adanya surat keputusan tersebut menjadi norma dan kebiasaan dalam menjalankan tugas dilapangan.

Menurut Van Meter dan Van Horn, norma meliputi aturan yang disepakati bersama dan norma-norma yang diciptakan dalam organisasi. Dalam pelaksanaan Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air Dinas Perkebunan dan Pemerintah Kecamatan Reteh memiliki komitmen dan keseriusan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Petunjuk Teknis dan Surat Keputusan menjadi instrumen dalam membentuk norma dan kebiasaan dalam Dinas Perkebunan dan Pemerintah Kecamatan Reteh dalam hal ini lembaga pengelola eskavator. Hal ini menciptakan komitmen dan kedisiplinan dalam mengimplementasikan

Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh.

### 1.3.3. Pola-Pola Hubungan dalam Organisasi

Proses komunikasi dan informasi akan terlihat pada pola hubungan dalam pelaksana kebijakan. Pada penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana pola hubungan dalam Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dan Kecamatan Reteh. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir :

“... kita dalam petunjuk teknis pelaksanaannya ada empat tahap dan itu semua dimulai dengan musyawarah, kita menjunjung tinggi musyawarah, kita melakukan musyawarah dalam melakukan monev sehingga hasil yang dikeluarkan juga sesuai dengan yang sebenarnya, muasyawarah juga kami lakukan untuk merencanakan apa yang akan kami lakukan ke depan...” (wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Drs. H. Eddiwan Sasbi, MM pada 23 oktober 2019)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pola hubungan di dalam Dinas Perkebunan terjadi dalam bentuk musyawarah. Dengan adanya musawarah maka para pelaksana dilapangan akan lebih paham dan jelas dengan apa yang akan dilakukan dan masyarakat akan lebih pahan dengan apa yang akan dilakukan pemerintah. Musyawarah juga dilakukan dalam merencanakan kegiatan yang akan dilakukan untuk masa depan. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Reteh sebagai berikut:

“... kita musyawarah dahulu sebelum melaksanakan kegiatan, dari awal sampai selesai kita musyawarah, dan kita libatkan langsung masyarakat, di lapangan kita sama masyarakat juga berdoa bersama dahulu ketika alat berat diturunkan dan bergerak agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar...” (wawancara peneliti dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Sitti Sulastri Kusumawati, S.Sos pada 30 oktober 2019)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa musyawarah menjadi hal yang didahulukan sebelum melaksanakan kegiatan. Hal ini menunjukkan pola hubungan yang terjadi terjalin dalam proses musyawarah yang dilakukan. Musyawarah dan doa bersama dilakukan agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan salah satu masyarakat di Desa dungai Asam sebagai berikut :

“... iya, kami ikut musyawarah, nanti dikasih tahu sama pemerintah mereka butuhnya apa dan apa yang kami bisa bantu di sini, seperti jalan untuk Eskavator...” (wawancara peneliti dengan Didi salah satu masyarakat di Desa Sungai Asam)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, pola hubungan yang terjalin terjadi dalam proses musyawarah yang juga melibatkan masyarakat. Dilibatkannya masyarakat dalam proses musyawarah adalah untuk meminta bantuan dalam melaksanakan program Trio Tata Air di lapangan.

Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn, pola hubungan kerja dalam organisasi akan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Pola hubungan birokrasi dalam organisasi dapat dilihat dalam proses penyampaian informasi dan komunikasi. Dalam pelaksanaan Program Pembangunan,

Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh pola-pola hubungan dalam organisasi terjadi dalam bentuk musyawarah dan rapat-rapat antara Dinas Perkebunan, Pemerintah Kecamatan dan Kepala Desa setempat serta adanya keterlibatan langsung masyarakat. Pola-pola hubungan ini berjalan dengan baik dan mendukung pelaksanaan Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh.

#### **1.4. Sikap atau Kecenderungan (disposisi) pelaksana**

Sikap dari pelaksana akan mempengaruhi sebuah kebijakan baik itu sikap penolakan maupun sikap penerimaan. Kemauan pelaksana untuk melaksanakan sebuah kebijakan akan dipengaruhi oleh pemahaman yang baik dari pelaksana terkait kebijakan tersebut. Disposisi pelaksana meliputi tiga hal yaitu:

##### **1.4.1. Respon Implementor Terhadap Kebijakan**

Respon yang diberikan implementor pada suatu kebijakan akan mempengaruhi kemauan implementor dalam melaksanakan kebijakan. Kesungguhan implementor dalam melaksanakan kebijakan menunjukkan adanya respon implementor. Dalam pelaksanaan Program Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air, respon yang baik dari Dinas Perkebunan dan Pemerintah Kecamatan Reteh akan mempengaruhi bagaimana pelaksanaan Program. Berikut wawancara dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir:

“... sekarang pelaksanaan sudah di Kecamatan semua, sebelum itu kita yang melakukan kita bisa menanggapi keluhan-keluhan masyarakat melalui sosialisasi dan musyawarah, karena sekarang semua sudah di Kecamatan jadi Kecamatan lah yang sering turun ke lapangan paling tahu akan keluhan masyarakat di lapangan... kita tinggal monev saja” (wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Drs. H Eddiwan Sasbi, MM pada 23 oktober 2019).

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas Perkebunan tidak lagi menanggapi secara langsung keluhan-keluhan masyarakat di lapangan.

Hal ini dikarenakan setelah pelaksanaan dilaksanakan di Kecamatan, Dinas Perkebunan tidak lagi rutin turun ke lapangan setiap saat karena sudah ada Kecamatan yang akan melaporkan segala masalah-masalah dan Dinas Perkebunan melakukan monitoring evaluasi terhadap laporan dari Kecamatan.

Berikut wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Reteh:

“...bukan apa-apa dek, walaupun sekarang semua di Kecamatan tidak semua juga bisa kita jangkau, kita selagi masih bisa kita kerjakan kita kerjakan sebisa kita dek, masyarakat itu banyak yang minta agar giliran kebun mereka lagi yang harus diperbaiki, kita karna eskavator cuma satu jadi kita maksimalkan saja dan juga sesuai anggaran yang tersedia, kadang kita mau saja langsung respon permintaan masyarakat, jadi caranya kita membuat masyarakat sabar dan mengerti saja, tapi ya kita bekerja hanya sesuai anggaran saja, jika anggaran tidak ada kita susah juga, padahal kasihan petani-petani itu...” (wawancara peneliti dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Reteh Sitti Sulastri Kusumawati, S.Sos pada 30 oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan Reteh sudah merespon dengan baik apa yang menjadi keluhan masyarakat, tetapi keluhan tersebut menjadi sukar untuk ditanggapi karena terbatas oleh anggaran dan alat berat eskavator, sehingga pemerintah

Kecamatan berusaha membuat masyarakat sabar dan mengerti akan adanya keterbatasan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Sungai Asam berikut:

“... susah juga mau dipaksakan, memang tidak ada duitnya alatnya juga sedang dipakai di Desa lain, jadi ya pemerintah berikan pengertian kepada masyarakat dijelaskan kendalanya...”  
(wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sungai Asam M. Taher pada 31 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pemerintah berusaha merespon keluhan masyarakat, tetapi hal tersebut terkendala karena keterbatasan anggaran dan sarana eskavator sehingga pemerintah berusaha membuat masyarakat mengerti dengan memberikan penjelasan. Berikut wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat di Desa Sungai Asam:

“... pemerintah sudah baik, tapi kita ni butuhnya kan ingin cepat, tapi masyarakat bilang anggaran kurang, alat berat sedang dipakai, ya kita mau bilang apa lagi, kita tunggu giliran dan bersabar saja...”  
(wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat di Desa Sungai Asam M. Taher pada 31 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah mencoba memberikan pengertian kepada masyarakat terkait kendala yang dihadapi. Hal ini membuat masyarakat sabar dan mau menunggu giliran mereka dalam pelaksanaan program.

Menurut Donald van Meter dan Carl van Horn, respon implementor akan mempengaruhi kemauan implementor dalam melaksanakan kebijakan. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, sejauh ini pemerintah sangat merespon apa yang menjadi kendala dan keluhan masyarakat yang ingin kebunnya

segera diperbaiki. Namun demikian respon tersebut sulit untuk dilaksanakan karena adanya keterbatasan anggaran dan alat berat eskavator sehingga pemerintah menyampaikan penjelasan supaya masyarakat mengerti dan mau bersabar.

#### 1.4.2. Kognisi

Kognisi yang dimaksud dalam implementasi kebijakan adalah pemahaman implementor terhadap kebijakan yang mempengaruhi imple,emntasi kebijakan. Jika implementor tidak memiliki pemahaman mengenai kebijakan yang laksanakan, maka kebijakan yang dilaksanakan akan sulit untuk dilaksanakan. Dalam peneitinan ini adalah bagaimana pemahaman implementor dalam memahami Porgram Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat pemahaman akan tujuan program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir:

“... Program Trio Tata Air ni kan tujuannya untuk menyelamatkan kebun-kebun kelapa masyarakat yang tenggelam dan hampir tenggelam juga, juga menyelamatkan kondisi lingkungan, yaa tentu itu semua untuk kita bersama supaya masyarakat bisa sejahtera...”  
(wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Drs. H. Eddiwan Sasbi, MM pada 23 oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Kepala Dinas Perkebunan telah memahami tujuan utama dari Program Pembangunan,

Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir :

“... iya tujuan utamanya untuk menyelamatkan kebun masyarakat dan kondisi lingkungan sekitar...” (wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir pada 23 oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perkebuna Kabupaten Indragiri Hilir telah memiliki pemahaman terhadap program Trio Tata Air. Hal tersebut juga serupa dengan pernyataan Camat Reteh Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

“... sudah jelas lah tujuannya untuk menyelamatkan kebun Kepala masyarakat, lingkungan juga yang di sekitarnya dapat terselamatkan, tinggal bagaimana kita rutin merawat tanggul-tanggul itu tidak jebol lagi...”(wawancara peneliti dengan Camat Reteh Mohd. Rafi, S.Pd pada 30 Oktober 2019)

Dari hasil wawancara di atas dapat di lihat bahwa Camat Kecamatan Reteh telah memahami tujuan utama program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air adalah untuk menyelamatkan perkebunan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Menurut Van Meter dan Van Horn, pemahaman implementor pada sebuah kebijakan akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Jika implementor tidak paham atau tidak memiliki pemahaman terhadap kebijakan yang dilaksanakan, maka kebijakan tersebut akan sukar untuk dilaksanakan. Berbagai penjabaran diatas memperlihatkan bahwa Dinas Perkebunan dan

Kecamatan Reteh memiliki pemahaman akan tujuan utama dari Program Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air. Sejauh ini pihak-pihak yang terlibat dalam program Trio Tata Air sudah memahami tentang tujuan dari program namun belum semua yang memahami secara mendalam mengenai tujuan dari program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air.

#### 1.4.3. Intensitas Disposisi Implementor

Intensitas Disposisi implementor yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor dalam hal ini mengacu pada kecenderungan dari implementor terhadap suatu nilai untuk menentukan pilihannya dalam melaksanakan kebijakan. Preferensi nilai berkaitan dengan keyakinan dari implementor terhadap apa yang diterimanya dari suatu kebijakan.

Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air adalah program yang bertujuan untuk menyelamatkan dan memperbaiki perkebunan kelapa masyarakat dan lingkungan sekitar perkebunan. Dengan banyaknya perkebunan yang rusak akibat air laut yang masuk ke dalam perkebunan mengakibatkan perkebunan rusak dan sulit untuk ditanami, air laut tersebut juga masuk ke pemukiman dan membanjiri jalan umum sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

“... air laut yang masuk itu banyak menimbulkan masalah-masalah yang utama kebun rusak karena terendam, bahkan ada yang benar-benar tidak bisa digunakan kembali. Jadi program Trio Tata Air dilakukan untuk memperbaiki itu semua, tetapi saya rasa belum maksimal karena eskavator yang Cuma ada satu per Kecamatan dengan kerusakan yang begitu luas, seharusnya kita ada penambahan eskavator biar bisa lebih cepat kerja kita...” (wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Drs. H. Eddiwan Sasbi, MM pada 23 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa dengan adanya program Trio Tata Air ini mampu mengatasi persoalan perkebunan masyarakat yang rusak. Namun kekurangan sarana eskavator mengakibatkan pengerjaan menjadi lambat dalam mencapai seluruh kebun yang rusak. Penambahan sarana eskavator menjadi hal yang dibutuhkan agar pengerjaan pembangunan dapat dilakukan lebih cepat dan mampu mencakupi seluruh wilayah perkebunan yang rusak. Hal sejalan juga diungkapkan oleh Camat Reteh Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

“... program ini sudah bagus dan pas, tapi kebun yang rusak itu banyak, kita mengurangi di hulu dihilir malah tambah rusak, eskavator kita cuma satu, tidak bisa menjangkau sekaligus, jadi seharusnya kita harus bisa menambah eskavator dan anggaran untuk pelaksanaan program, biar lebih baiknya kita harus menambah jumlah eskavator dan anggaran operasionalnya...” (wawancara peneliti dengan Camat Reteh Mohd. Rafi, S.Pd pada 30 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas Perkebunan memiliki preferensi bahwa program Trio Tata Air sudah tepat dilakukan untuk menyelamatkan perkebunan kelapa dan lingkungan sekitar. Namun dalam pelaksanaannya mengalami kendala seperti kurangnya sarana eskavator yang hanya dimiliki 1 buah per Kecamatan sehingga program

lambat selesai. Penambahan anggaran dan eskavator menjadi hal yang dibutuhkan agar program dapat berjalan lebih baik dan mampu menjangkau kebun-kebun yang rusak lebih luas. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Sungai Asam sebagai berikut:

“... programnya sudah sangat bagus, bupati tau apa yang dibutuhkan masyarakat. Tapi lambat kita kerjanya, bagaimana tidak kita eskavator Cuma satu kebun banyak yang rusak, sebaiknya tambah lagi eskavatornya...” (wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sungai Asam M. Taher pada 31 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Sungai Asam merasa bahwa program Trio Tata Air sudah tepat dan bagus, Bupati tahu dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Tetapi dalam pengerjaannya dirasa lambat hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana Eskavator, sehingga tidak bisa menjangkau lahan rusak lebih luas.

Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn, intensitas disposisi Implementor adalah preferensi nilai yang dipahami implementor mengenai sebuah kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, Dinas Perkebunan dan Kecamatan Reteh nerasa yakin bahwa program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air ini sudah tepat dan mampu menyelamatkan ataupun mengurangi kerusakan lahan perkebunan kelapa dan lingkungan sekitar. Namun dalam pelaksanaannya memakan waktu yang lama karena kurangnya eskavator. Penambahan sarana eskvator dan anggaran menjadi solusi yang ditawarkan untuk mempercepat dan memperluas proses

pelaksanaan program sehingga pelaksanaan program dapat dilaksanakan lebih luas dan cepat.

### 1.5. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi adalah syarat yang penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh dukungan antar instansi yang terlibat. Semakin baik komunikasi dan koordinasi yang ada diantara pihak-pihak yang terlibat maka kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan informasi dapat tersampaikan dengan baik.<sup>1</sup>

Komunikasi antar organisasi dalam implementasi Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh yaitu komunikasi dan Koordinasi yang terjadi di antara organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dan Kecamatan Reteh. Komunikasi yang baik antara Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dan Kecamatan Reteh sangat diperlukan hal ini tentu akan menunjang proses pelaksanaan program. Komunikasi antar Organisasi juga dilakukan pada setiap tahap pelaksanaan Program Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh. Berikut wawancara dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir:

“... kita di Dinas tentu koordinasi kita baik-baik saja, tapi saya merasa koordinasi kepada Kecamatan agak kurang, malah sangat

---

<sup>1</sup> Agustino. Ibid. Hlm 145

jarang sekali, mohon maaf saja, dari 20 Kecamatan yang rutin melaporkan kendala-kendala di lapangan hanya Kecamatan pelangiran, laporan tahunan itu sangat lambat disampaikan, seharusnya apapun yang terjadi di lapangan Kecamatan seharusnya melaporkan hal tersebut ke Dinas, laporan itu boleh terkait kebijakan dan juga teknis, dan karena itulah tahun 2020 nanti semua akan dikembalikan ke Dinas...” (wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Drs. H. Eddiwan Sasbi, MM pada 23 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara Dinas Perkebunan dan Kecamatan Reteh berjalan tidak baik. Kecamatan sangat jarang sekali melaporkan kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Kepala Dinas Perkebunan berharap bahwa Kecamatan rutin melaporkan kendala-kendala baik itu masalah kebijakan maupun kendala teknis. Akibatnya, tahun 2020 pelaksanaan program Trio Tata Air akan dikembalikan ke Dinas Perkebunan. Keadaan tersebut tentu sangat menghambat proses pelaksanaan program hal ini dikarenakan komunikasi dilakukan pada setiap tahap pelaksanaan Program Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh. Hal tersebut berbeda dengan pernyataan dari Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

“... alhamdulillah koordinasi kita baik-baik saja, dan koorDinas kita ke Dinas juga baik-baik saja, kita juga sudah memberikan laporan tiap tahun ... jika ada kendala tertentu juga kita laporkan jika tidak bisa kita tangani...” (wawancara peneliti dengan Camat Reteh Mohd. Rafi, S.Pd pada 30 oktober 2019)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kecamatan Reteh merasa telah melakukan koordinasi yang baik dengan Dinas Perkebunan. Komunikasi dan koordinasi di internal Kecamatan Reteh juga

telah berjalan dengan baik. Kecamatan Reteh juga telah memberikan laporan tiap tahunnya dan akan menyampaikan jika ada kendala. Perbedaan pernyataan antara Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dan Camat Reteh menunjukkan adanya komunikasi yang kurang baik antara Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dan Kecamatan Reteh. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Reteh sebagai berikut:

“... bagus lah, baik-baik saja tidak ada kendala kita korrDinasi sama Dinas laporan sudah kita berikan ke Kepala Dinas...”  
(wawancara peneliti dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Reteh Sitti Sulastri Kusumawati, S.Sos pada 31 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kecamatan telah memberikan laporan kepada Dinas Perkebunan tiap tahunnya dan merasa telah berkoordinasi dengan baik dengan Dinas perkebunan dan tidak ada kendala. Hal tersebut berbeda dengan pernyataan Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

“... itulah yang menurut saya sekarang jadi kendala, Kecamatan sangat jarang koordinasi ke Dinas termasuk Camat Reteh, bisa dibilang tidak ada komunikasi dengan kita, seharusnya camat rutin komunikasi dan koordinasi dengan kita karena kita kan Dinas teknisnya tentu kita sangat bisa membantu...” (wawancara Peneliti dengan Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Ngadiyo, S.ST pada 24 oktober 2019).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perkebunan merasa komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah

Kecamatan sangat tidak baik termasuk Kecamatan Reteh. Hal ini dikarenakan Pemerintahan Kecamatan sangat jarang memberikan laporan kendala dan lambat memberikan laporan tahunan. Pemerintah Kecamatan seharusnya rutin memberikan laporan ke Dinas Perkebunan karena yang merupakan pelaksana teknis program.

Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn salah satu variable yang menentukan keberhasilan kebijakan adalah komunikasi antar organisasi. Komunikasi dan koordinasi antara seluruh pihak pihak terlibat yang semakin baik maka dapat diasumsikan kendala dan kesalahan akan sangat kecil terjadi dan informasi antar organisasi pun dapat tersampaikan dengan lebih baik. Komunikasi antar organisasi dilakukan pada keempat tahap pelaksanaan Program Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hiir. Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan sejauh ini komunikasi antar organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan Porgram Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air masih belum baik dan belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari laporan yang lambat di sampaikan serta komunikasi terkait kendala di lapangan yang kurang. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan porgram dari akan dikembalikan ke Dinas Perkebunan mulai dari 2020.

## 1.6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn yakni sejauh mana lingkungan eksternal dapat mendorong keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sosial, ekonomi dan politik<sup>2</sup>. Berikut uraian lingkungan sosial, ekonomi dan politik pada pelaksanaan Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh.

### 1.6.1. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial dalam implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn meliputi tanggapan opini publik atau masyarakat di lingkungan dan karakteristik masyarakat di wilayah pelaksanaan kebijakan. Lingkungan sosial yang dimaksud dalam Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh adalah masyarakat petani. Tanggapan dan opini dari masyarakat petani terhadap program akan mempengaruhi pelaksanaan program. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir:

---

<sup>2</sup> Agustino. Ibid.hlm 144

“... masyarakat sangat antusias dan mendukung adanya program Trio Tata Air ini, bagaimana tidak kalau dulu pemerintah tidak membantu sepenuhnya, nah sekarang semua pelaksanaan dan pengadaan alat dan sarana dilakukan oleh pemerintah jadi masyarakat hanya bantu gotong-royong saja untuk jalan eskavator, dan masyarakat sangat membantu masyarakat malah memberikan makanan pada operator dilapangan memberikan tempat tinggal, mengadakan kenduri dan berdoa bersama, macam-macam lah masyarakat sangat senang...”(wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Drs. H. Eddiwan Sasbi, MM pada 23 oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tanggapan dan opini masyarakat terhadap pelaksanaan program sangat baik. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah sehingga masyarakat sangat senang dan bergotong royong membantu agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu masyarakat juga mengadakan syukuran dan doa bersama agar pelaksanaan program dapat dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Camat Reteh Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

“... masyarakat bagaimana mau menentang, karena ini lah yang mereka inginkan kebun mereka diperbaiki semua dilakukan oleh pemerintah, mereka sangat senang dengan adanya program ini, masyarakat juga ikut gotong royong, kita juga makan dan doa bersama sebelum melakukan pekerjaan di lapangan...” (wawancara peneliti dengan Camat Reteh Mohd. Rafi, S.Pd pada 30 oktober 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dukungan masyarakat akan adanya program Trio Tata Air sangatlah baik. Masyarakat sangat senang dengan adanya program Trio Tata Air yang memperbaiki perkebunan mereka dan semuanya ditanggung oleh pemerintah. Masyarakat bergotong-royong membantu dan melakukan makan dan doa bersama

sebelum pelaksanaan di lapangan. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala

Desa Sungai Asam sebagai berikut:

“... sangat senang, mau macam mana lagi dibilang senangnya, apapun pemerintah minta bantu dibantu sama msyarakat ni, macam mana tidak kebunnya diperbaiki siapa yang tidak mau, nyumbang duit pun masyarakat mau, karena kebun kelapa ni sudah jadi hidup masyarakat...” (wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sungai Asam M. Taher pada 31 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat senang dengan adanya program Trio Tata Air. Hal ini dikarenakan program ini bertujuan untuk menyelamatkan dan memperbaiki perkebunan masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Desa Sungai Undan sebagai berikut:

“... masyarakat sangat senang, bisa dibilang saking senangnya masyarakat tak tak tau mau bilang apa lagi karena kan memang ini yang ditunggu masyarakat...” (wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sungai Undan Abdul Rakhman, S.Pd pada 31 Oktober 2019)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa masyarakat sangat senang adanya program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air. Berikut pernyataan dari salah satu masyarakat di Desa Sungai Asam:

“... kita sangat sangat mendukung dek, kita gotong royong supaya eskavator bisa lewat, tempat tinggal sama makan operator juga kita berikan sehari-hari, kalau operatornya sakit kita juga yang susah...” (wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat di Desa Sungai Asam M. Taher pada 31 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat mendukung pelaksanaan program. Masyarakat bergotong-

royong membuat jalan eskavator agar bisa lewat menuju lokasi. Selain itu makan dan tempat tinggal sehari-hari operator di lapangan masyarakat juga bersedia membantu. Berikut wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Sungai Undan:

“... pokoknya gini, apapun yang pemerintah minta bantu, kita langsung bantu yang penting kebun kami diperbaiki, pemerintah sudah mau datang untuk perbaiki saja kami sangat senang..”  
(wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat di Desa Sungai Undan Abdul Rakhman, S.Pd pada 1 November 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat senang dan akan membantu apapun yang pemerintah minta dalam pelaksanaan program. Mereka hanya berharap kebun mereka segera diperbaiki.

Gambar 5.5  
Kegiatan Gotong-royong Masyarakat dan Pemerintah Membuat Jalan  
Eskavator dan Makan bersama



*Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2019*

Gambar 5.5 menunjukkan aktivitas gotong-royong dan makan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam gambar tersebut dapat dilihat masyarakat dan pemerintah yang saling membantu dalam pelaksanaan

program. Eskavator digerakkan melalui batang kelapa tua yang sudah mati yang dijadikan jalan untuk ekavator menuju lokasi.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dukungan masyarakat sangat baik terhadap program. Dukungan masyarakat sangat diperlukan agar program dapat terlaksana dengan baik. Masyarakat sangat senang dengan adanya Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air yang ditujukan untuk menyelamatkan dan memperbaiki perkebunan masyarakat. Masyarakat dan pemerintah saling bekerja sama dalam melaksanakan program.

### **1.6.2. Lingkungan Ekonomi**

Lingkungan ekonomi dalam implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn adalah tersedianya sumber daya ekonomi pada lingkungan sekitar pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat seperti apa pengaruh kondisi ekonomi dalam implementasi Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh. Lingkungan ekonomi yang dimaksud adalah kondisi ekonomi masyarakat petani di Kecamatan Reteh sebagai sasaran Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perkebuna Kabupaten Indragiri Hilir:

“... sebenarnya sudah bisa kita tebak kondisi ekonomi di sana, sudah jelas saja masyarakat petani di sana kondisi ekonominya kesulitan, bagaimana tidak, kebun mereka yang biasanya menghasilkan untuk kebutuhan mereka banyak yang rusak, tapi alhamdulillahnya masyarakat mau membantu dan tidak menghambat jalannya program, jadi saya harap program ini benar-benar dapat membuat sejahtera lagi...” (wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Drs. H. Eddiwan Sasbi, MM pada 23 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa kondisi ekonomi masyarakat sedang kesulitan. Hal ini disebabkan oleh kebun yang biasanya digunakan sebagai mata pencaharian dalam mencukupi kehidupan sehari-hari telah rusak dan tidak bisa dimanfaatkan. Walaupun demikian, kondisi ekonomi yang sedang sulit tersebut tidak mengganggu pelaksanaan program di lapangan karena masyarakat mau membantu bergotong-royong untuk menyelesaikan pembangunan. Berikut pernyataan Camat Reteh Kabupaten Indragiri Hilir :

“... ekonomi masyarakat tentu sekarang sangat kesulitan, tapi masyarakat tetap membantu kita, karna program ini untuk memperbaiki kebun mereka yang digunakan sebagai mata pencaharian mereka, jadi program tetap berjalan...” (wawancara peneliti dengan Camat Reteh Mohd. Rafi, S.Pd pada 30 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat sedang tidak baik. Hal ini dikarenakan kebun kelapa sebagai mata pencaharian mereka sudah tidak menghasilkan lagi. Tetapi kondisi tersebut tidak mengganggu pelaksanaan program karena masyarakat tetap membantu pelaksanaan program di lapangan. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sungai Asam:

“... masyarakat sangat susah dek, bagaimana tidak, kebun kelapa mereka rusak, apa yang mau dicari, kebun sudah jadi laut, palingan nogok udang, kebun tadi karna jadi laut malah menghasilkan udang, kalau program tetap jalan dan masyarakat tetap bantu jika dibuthkan bantuan...” (wawancara peneliti dengan Kepala Desa Dungai Asam M. Taher pada 30 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa kondisi ekonomi masyarakat sedang tidak baik. Hal tersebut dikarenakan kebun yang biasanya digunakan sebagai mata pencaharian sudah tenggelam oleh air laut. Kebun yang terendam air laut dimanfaatkan masyarakat menangkap udang yang banyak disekitar kebun yang tenggelam. Walaupun demikian kondisi tersebut tidak mengganggu pelaksanaan program di lapangan karena masyarakat tetap membantu jika diperlukan. Berikut wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat di Desa Sungai Asam:

“... kalau dibilang sedang susah, dari dulu juga sudah susah, ini pemerintah mau perbaiki kebun kita, kita bantu apapun yang bisa kita bantu, kemaren itu kita bantu buat jalan eskavator lewat, alhamdulillah eskavator bisa lewat...” (wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat di Desa Sungai Asam M. Taher pada 31 oktober 2019)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat sedang kesulitan karena perkebunan masyarakat yang sedang rusak. Program Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air menjadi solusi dalam membantu masyarakat memperbaiki kebun mereka. Masyarakat sangat antusias dan membantu pengerjaan di lapangan seperti pembuatan jalan eskavator. Hal tersebut tentu sangat membantu dan tidak menghambat pelaksanaan program di lokasi pelaksanaan.

Lingkungan Ekonomi meliputi sumber daya ekonomi dilingkungan pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan dalam implementasi Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh kondisi ekonomi masyarakat petani sedang mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan kebun-kebun kelapa yang biasanya digunakan sebagai mata pencaharian sehari-hari telah rusak dan tenggelam. Ada kebun yang digunakan sebagai tambak udang karena air yang telah menggenangi perkebunan mendatangkan udang-udang yang dapat menghasilkan dan dijual. Permasalahan ekonomi yang terjadi pada masyarakat petani di Kecamatan Reteh tidak menghambat pelaksanaan program di lokasi karena masarakat tetap membantu bergotong-royong dalam menyelamatkan kebun masyarakat.

### 1.6.3. Lingkungan Politik

Lingkungan politik tidak kalah penting dalam mempengaruhi pelaksanaan kebijakan selain kondisi lingkungan sosial dan ekonomi. Dukungan elit politik dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. Lingkungan politik yang dimaksud dalam hal ini adalah dukungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh. Dukungan elit politik dalam pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air dapat dilihat dari misi Bupati Indragiri Hilir yang berusaha menyelamatkan kebun kelapa rakyat dan melakukan percepatan dalam

melakukan pelaksanaannya. Dari misi tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sangat mendukung dalam menyelamatkan kebun kelapa rakyat. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga menjadikan Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air menjadi fokus pembangunan perkebunan lima tahun ke depan. Hal ini tentu menunjukkan bahwa dukungan Bupati dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sangat serius dalam pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air untuk menyelamatkan perkebunan kelapa rakyat. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir:

“... Bupati lah yang paling gencar menyuarakan program ini, sesuai dengan misi Bupati menyelamatkan kebun kelapa rakyat, sudah tidak diragukan lagi dedikasi Bupati biar petani kelapa bisa sejahtera kembali... kemudian Pemerintah provinsi juga sangat mendukung, karena Provinsi juga membangu 12 Eskavator ke kita” (wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Drs. H. Eddiwan Sasbi, S.Pd pada 23 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dukungan elit politik dalam hal ini Bupati sangat serius. Hal ini bisa dilihat dari misi Bupati untuk menyelamatkan perkebunan kelapa rakyat. Melalui Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air diharapkan benar-benar dapat menyelamatkan perkebunan kelapa rakyat dan membuat masyarakat petani lebih sejahtera. Selain itu Pemerintah Provinsi Riau juga sangat mendukung dan membantu pelaksanaan program dengan memberikan bantuan sebanyak 12 eskavator untuk menunjang pelaksanaan

program. Berikut wawancara peneliti dengan Camat Reteh Kabupaten Indragiri Hilir .

“... sudah jelas lah bupati yang buat programnya, dalam misinya menyelamatkan kebun kelapa rakyat karna memang ini yang dibutuhkan masyarakat...” (wawancara peneliti dengan Camat Reteh Mohd. Rafi, S.Pd pada 30 Oktober 2019)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dukungan elit politik dalam Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air sangat besar. Hal ini dikarenakan Bupati dalam misinya ingin menyelamatkan kebun kelapa rakyat. Penyelamatan kebun kelapa yang rusak menjadi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki banyak perkebunan kelapa. Adanya program ini diharapkan bisa menyelamatkan kebun kelapa rakyat dan membuat masyarakat hidup lebih sejahtera.

Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn, Lingkungan politik meliputi peran elit politik dalam pelaksanaan kebijakan. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini Bupati sangat mendukung pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air. Hal tersebut dikarenakan program tersebut merupakan turunan dari misi Bupati Indragiri Hilir dalam menyelamatkan kebun kelapa rakyat dengan menjadikan Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air mejadi fokus pembangunan perkebuna 5 tahun ke depan dan dilanjutkan setelah Bupati lanjut ke periode kedua masa jabatannya. Adanya dukungan dari Pemerintah

Kabupaten Indragiri Hilir ini membantu pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

### **1.7. Kinerja Implementasi Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air Perkebunan di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.**

Berdasarkan pemaparan diatas yang telah peneliti jelaskan sebelumnya sejauh ini pelaksanaan Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir telah dilakukan. Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn, proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performasi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengajadilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.<sup>3</sup> Dilihat dari pencapaian implementasi kebijakan terhadap sasaran kebijakan, kebijakan dianggap semakin memiliki kinerja yang lebih baik ketika pencapaian tujuan kebijakan semakin tinggi. Dalam penelitian mengenai Implementasi Program Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir ini dapat dilihat kinerja kebijakan yang baik tercipta apabila tujuan utama dari program ini dapat tercapai. Tujuan utama dari program ini adalah tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat petani dengan

---

<sup>3</sup> Leo Agustino. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. 2016. Bandung. Alfabeta. Hlm133

memperbaiki trio tata air perkebunan sehingga lingkungan sekitar juga dapat diselamatkan.

Kinerja Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dapat diukur menggunakan model implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang berkaitan satu sama lain dalam mempengaruhi pelaksanaan Program. dalam Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan peneliti deskripsikan menggunakan model implemetasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, peneliti mengidikasikan Implementasi Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan dengan baik dan belum optimal. Implementasi program ini telah direncanakan dengan baik dan dilakukan dengan merata dan adil pada setiap tempat yang mengalami kerusakan perkebunan, namun pelaksanaan yang lambat membuat tujuan yang direncanakan juga lambat tercapai. Hal ini disebabkan beberapa variabel yang dikemukakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn masih memiliki kendala. Kendala tersebut adalah sumber daya sarana dan waktu seperti terbatasnya dan kurangnya alat berat dan kondisi alam yang tidak menguntungkan menghambat pelaksanaan program berjalan dengan optimal. Variabel Komunikasi antar Organisasi juga kurang baik yakni komunikasi antara Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dan Kecamatan Reteh. Pemahaman

terhadap Program juga belum merata serta respon yang kurang tanggap dalam melihat permasalahan juga mengakibatkan pelaksanaan Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air di Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir berjalan belum optimal.

